

JAWA POS

RADAR MADIUN

RADAR MAGETAN

Kamis, 17 Februari 2022

--Bupati Menulis--



Oleh: Suprawoto
(Bupati Magetan)

Tantangan Pers di Setiap Zaman

(Catatan HPN 2022)

SEJAK pertengahan abad ke-18, warga Belanda di Indonesia mengenalkan surat kabar. Walau penerbitnya warga Belanda, pengekangan terhadap pers tetap berlaku. Surat kabar pertama *Bataviase Nouvelles* terbit Agustus 1744. Ditutup pada 1744 karena peperangan pecah antara Belanda dengan Prancis dan Inggris. Ini supaya informasi tidak sampai ke negeri jajahan. Baru pada 1817 muncul kembali surat kabar *Bataviasche Courant*. Disusul munculnya surat kabar lain di beberapa kota besar seperti *Bataviasche Advertentieblad* (1827), *Soerabajasche Courant* (1831), dan *Semarangische Advertentieblad* (1845). Tentu semua berbahasa Belanda.

Sambungan dari Hal.16

Menariknya, yang membawa dan memelopori industri pers waktu itu justru orang Belanda. Namun, sebagai pengasuh media yang profesional, mereka kritis.

Lambat laun semakin banyak pribumi mengenyam pendidikan dan melekat huruf. Pers pun menjadi alat perjuangan. Tercatat para sarjana yang melibatkan diri di bidang pers, antara lain Wahidin Soedirohoesodo, Abdul Muis, Abdul Rivai, Ki Hadjar Dewantara, RM Tirtodisoerjo, dan RM Bintarti.

Lahirnya Budi Utomo memicu tumbuhnya media bak jamur di musim hujan. Sadar bahwa pers merupakan alat komunikasi perjuangan yang efektif, berbagai surat kabar lahir. Berbagai organisasi menerbitkan surat kabar atau majalah. Bahkan, karena merasa memiliki segmen besar, kaum perempuan juga menerbitkan surat kabar *Perempoean Bergerak*.

Menariknya, pada 29 Maret 1855 terbit *Bromartani*, surat kabar pertama yang berbahasa Jawa dan menggunakan huruf Jawa. Pendirinya Carel Frederik Winter, warga Belanda yang menjadi guru dan ahli bahasa Jawa di Surakarta. Surat kabar ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Jawa.

Sayangnya, *Bromartani* berumur pendek. Karena mengkritik kebijakan Residen Surakarta, akhirnya kena delik pers. Pengasuhnya dipenjarakan. Akhirnya *Bromartani* tidak terbit. Setelah *Bromartani*, terbit *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* (1856) di Surabaya. Disusul *Soerat Chabar Betawie* (1858), *Selompret Melajoe* (1860) di Semarang, *Bintang Timoer* (1862) di Surabaya, *Djoeroe Martani* (1864) di Surakarta, serta *Biang Lala* (1867) di Jakarta.

Bahkan mulai ada yang berani menggunakan nama *merdeka*. Seperti *Benih Merdeka*, surat kabar di Medan yang terbit November 1916. Pendirinya Moh. Samin, tokoh Sarekat Islam. Pada masa itu perlu nyali, mengingat ancaman hukumannya sedemikian berat.

Ketika Jepang berkuasa pada Februari 1942, pers Belanda dan China diambil alih penguasa Jepang. Kemudian ada lima surat kabar di bawah pengawasan militer Jepang. Ada *Jawa Shinbun*, *Sumatera Shinbun*, *Borneo Shinbun*, *Celebes Shinbun*, dan *Ceram Shinbun*. Juga di setiap daerah administratif diterbitkan mingguan *Syu Shinbun*.

Ada keuntungan meski pemerintah Jepang sangat ketat terhadap pers. Sebab, teknisnya dikerjakan oleh orang pribumi. Sehingga, pribumi punya kemampuan dalam teknis penerbitan pers. Kemampuan ini berguna ketika Indonesia merdeka dan kemudian pers mengambil peran dalam perjuangan kemerdekaan.

Tak heran, sampai tahun 1949 terdapat 75 surat kabar yang terbit dengan tiras 400.000 eksemplar. Pemerintah bergandengan erat dengan media. Subsidi kertas dan pinjaman keuangan diberikan.

Sayangnya, bulan madu kebebasan pers di awal kemerdekaan hanya sebentar. Pengekangan, penahanan, dan pengusiran terhadap wartawan asing mulai marak sejak Mei 1952. Bahkan, sepanjang Mei-Desember 1952, ada lima tuduhan terhadap pers Indonesia. Mulai penahanan, peringatan, gugatan, hingga pemberedelan.

Ketika awal berkuasa, pemerintahan Orde Baru juga memberi angin segar terhadap kebebasan pers. Namun, bulan madu juga berlangsung tidak lama. Ketika pecah peristiwa Malari 1975, kekangan terhadap pers semakin kuat. Berlingkungan di balik surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), pemerintah bisa membatalkan atau mencabut SIUPP. Pencabutan SIUPP

Beberapa surat kabar lain juga kena delik pers. Seperti penulis *Java Bode* (1864). Kemudian terhadap redaktur *Soerabajasche Handelsblad*, *Celebes Courant* (1868). Juga terhadap *Djoeroe Martani* (1869). Bahkan redaktur *Semarangische Courant* dan dua penulis *Java Bode* dikenakan pidana tambahan berupa pengusiran dari Indonesia.

Sensor dan penyerahan naskah sebelum terbit merupakan cara pemerintah mengontrol pers. Karena pers punya fungsi kontrol, maka pemberitaan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan penguasa Belanda akan dikenakan delik pers.

► Baca Tantangan... Hal.19

sama saja dengan pemberedelan.

Di era reformasi, pers memperoleh kembali kemerdekaannya. Namun, musuh justru hadir dari pers sendiri. Tokoh pers Djafar Assegaf menyebut istilah jurnalisme got. Pers menjadi tempat sumpah serapah. Era digital menjadikan tempat sumpah serapah beralih ke media sosial (medsos). Kecepatan menjadi tuntutan. Medsos justru menjadi rujukan pers dalam arti luas. *Trending topic* di medsos sangat memengaruhi pemberitaan pers.

Bahkan, kini berkembang *clickbait journalism* (jurnalisme umpan klik), yang hanya mengandalkan judul menarik. Sedangkan pengguna medsos cenderung asal *share* tanpa membaca isi. Pers di era digital harus segera mengambil langkah transformasi jika tidak ingin mati. Demikian pidato ketua PWI saat membuka HPN 2022. Bila dulu tantangan pers adalah penguasa, saat ini tantangan pers adalah dirinya sendiri.*** (naz/c1)